TRIPLE MARGINALISASI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

ARTIKEL

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Oleh

BAGAS RIZKY ARDIANSYAH

NIM. 223030702159

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama : Bagas Rizky Ardiansyah
NIM : 223030702159
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Artikel : *Triple Marginalisasi Perempuan Penyandang Disabilitas: Analisis Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Kota Palangka Raya*

Disetujui,
Palangka Raya, 2 Juni 2026
Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Suprayitno, S.AN., M.A.P	**Subhan Ilham Thareq, S.IP., MPA**
NIP. 199001012018031001	**NIP. 199307122023211027**
Tanggal: 2 Juni 2026	Tanggal: 2 Juni 2026

Penguji I	Penguji II
Imanuel Jaya, S.AP., M.AP	**Yonatan Ari Santoso, S.S., M.A.P.**
NIP. 198109242008121004	**NIP. 199105042022031005**
Tanggal: 2 Juni 2026	Tanggal: 2 Juni 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya

Prof. Bhayu Rhama, ST, MBA., Ph.D.
NIP. 197901052010121001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Rizky Ardiansyah

NIM : 223030702159

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel saya yang berjudul: "Triple Marginalisasi Perempuan Penyandang Disabilitas: Analisis Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Kota Palangka Raya", merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir Jurnal/Artikel ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Palangka Raya, 2 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Bagas Rizky Ardiansyah

NIM. 223030702159

IDENTITAS ARTIKEL ILMIAH

1.	Judul Artikel	:	Triple Marginalisasi Perempuan Penyandang Disabilitas: Analisis Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kota Palangka Raya
2.	Nama	:	Jurnal Administrasi Publik (JPAP)
3.	ISSN	:	e-ISSN: 2777-0206 & p-ISSN: 2776-8511
4.	Akreditasi Jurnal	:	Nasional/ SINTA 5
5.	Tautan DOI/Artikel	:	https://doi.org/10.37090/am52h828 https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jpap/article/view/3473
6.	Kode QR	:	

Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Volume 6, Nomor 1, Mei 2026 (96-105)
ISSN 2776-8511 (*print*) | 2777-0206 (*online*)
© 2026 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTB

TRIPLE MARGINALISASI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Bagas Rizky Ardiansyah[1)*], Setianingsih[2)], Suprayitno[3)], Subhan Ilham Thareq[4)]
(*e-mail*: bagasrizky1164@gmail.com[1])
(*) Corresponding Author
[1), 2), 3), 4)] Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

Inclusive employment policy in Palangka Raya City has not yet been able to provide equal employment access for persons with disabilities, particularly women. Various structural and substantive barriers continue to limit their participation in the formal labor sector. This study aims to analyze the implementation of inclusive employment policy and to examine the forms of marginalization experienced by women with disabilities. The study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving nine informants directly related to policy implementation. The analysis was conducted using George C. Edwards III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and was strengthened by Kimberlé Crenshaw's intersectionality perspective. The findings reveal that policy implementation has not been carried out optimally due to ineffective policy communication, limited resources, weak institutional support, and the absence of local technical regulations. Under these conditions, women with disabilities experience multiple forms of marginalization resulting from the intersection of gender, disability, and weaknesses in policy implementation. This study highlights the importance of strengthening institutional capacity and developing policies that are more responsive to gender and disability vulnerabilities.

Keywords: *Inclusive Employment Policy; Triple Marginalization; Women With Disabilities.*

ABSTRAK

Kebijakan ketenagakerjaan inklusif di Kota Palangka Raya masih belum mampu memberikan akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Berbagai hambatan struktural dan substantif masih membatasi keterlibatan kelompok ini dalam dunia kerja formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif serta memahami bentuk marginalisasi yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkuat dengan perspektif interseksionalitas Kimberlé Crenshaw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya dukungan kelembagaan, dan belum tersedianya regulasi teknis daerah. Dalam kondisi tersebut, perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi berlapis akibat persilangan faktor gender, disabilitas, dan kelemahan implementasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kerentanan gender dan disabilitas.

Kata Kunci: *Kebijakan Ketenagakerjaan Inklusif; Perempuan Penyandang Disabilitas; Triple Marginalisasi.*

I. PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, telah menjadi agenda global dalam

pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan melalui Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang menjamin hak atas pekerjaan yang setara dan bebas diskriminasi (United Nations, 2006), serta diperkuat oleh agenda decent work yang diusung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk memastikan akses terhadap pekerjaan yang produktif, aman, dan berkeadilan (Gunawan & Rezki, 2022). Sejumlah kajian empiris juga mulai menekankan pentingnya pendekatan *disability-inclusive employment* sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar kerja sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (Shaw *et al*., 2022; Chan & Hutchings, 2023).

Meskipun kerangka normatif tersebut berkembang secara progresif, implementasinya di berbagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya komitmen organisasi (Chan & Hutchings, 2023). Selain itu, kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya terwujud, termasuk di tingkat daerah yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan fasilitas aksesibel (Sirait *et al*., 2024).

Di Indonesia, kerangka regulasi terkait disabilitas telah berkembang sejak ratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menjamin hak atas pekerjaan, kesetaraan upah, serta akomodasi yang layak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat daerah (Warganegara *et al*., 2025; Sirait *et al*., 2024).

Secara empiris, partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja di Indonesia masih tergolong rendah. Data Kementerian Sosial RI (2024) menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja masih terbatas, dan kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika dilihat dari perbedaan gender. Perempuan penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi hambatan struktural, tetapi juga sosial dan kultural, yang membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia yang dipengaruhi oleh ketimpangan gender dalam pasar kerja (Dewi & Arisetyawan, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa peluang kerja bagi penyandang disabilitas ditentukan oleh interaksi kompleks antara faktor individu, hambatan sosial, serta struktur pasar kerja (Chan & Hutchings, 2023; Lu *et al*., 2024).

Untuk memahami kesenjangan antara kebijakan dan praktik tersebut, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Mertina *et al*., 2025). Namun, pendekatan ini cenderung berfokus pada dimensi struktural dan administratif, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana dampak kebijakan dirasakan oleh berbagai kelompok sosial. Dengan demikian, analisis implementasi perlu mempertimbangkan perspektif interseksionalitas dalam memahami distribusi akses kebijakan (Mac-Seing *et al*., 2021).

Dalam konteks tersebut, perspektif interseksionalitas menegaskan bahwa pengalaman ketidaksetaraan tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui persilangan berbagai identitas sosial dan

struktur sosial, seperti gender dan disabilitas, yang menghasilkan bentuk marginalisasi berlapis, termasuk dalam konteks masyarakat Indonesia (Rai *et al.*, 2020; Lestari & Kurniawan, 2025). Sejumlah studi menyebutkan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi yang lebih kompleks akibat interaksi antara stigma disabilitas dan konstruksi sosial berbasis gender (Kumar *et al.*, 2023; Abusalha, 2024).

Dalam konteks lokal, Kota Palangka Raya dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan daerah di luar Pulau Jawa yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan inklusif. Keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja, pekerjaan formal, serta fasilitas publik yang aksesibel menyebabkan sebagian penyandang disabilitas, khususnya perempuan, bertahan di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai (Deviyeni *et al.*, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang berlapis.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan dan interseksionalitas umumnya masih dilakukan secara terpisah. Studi implementasi kebijakan lebih banyak menekankan efektivitas administratif, seperti koordinasi, sumber daya, dan kelembagaan, tanpa menjelaskan bagaimana kebijakan menghasilkan dampak yang berbeda terhadap kelompok sosial tertentu. Sebaliknya, kajian interseksionalitas cenderung berfokus pada pengalaman diskriminasi perempuan penyandang disabilitas tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan proses implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan hambatan implementasi terutama sebagai persoalan administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan implementasi juga menghasilkan dampak sosial yang tidak setara terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dan perspektif interseksionalitas guna memahami bagaimana kegagalan kebijakan tidak hanya terjadi secara administratif, tetapi juga menghasilkan marginalisasi berlapis terhadap perempuan penyandang disabilitas, khususnya di tingkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya; dan (2) mengkaji bagaimana kegagalan implementasi kebijakan tersebut menghasilkan dampak marginalisasi yang berlapis terhadap perempuan penyandang disabilitas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada Kota Palangka Raya sebagai unit kasus, tetapi juga menggunakan kasus tersebut untuk memahami interaksi antara implementasi kebijakan dan interseksionalitas dalam ketenagakerjaan inklusif. Pendekatan ini relevan karena implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika sosial serta kelembagaan di tingkat lokal (Yanuardi *et al.*, 2022). Melalui studi kasus instrumental, penelitian dapat menggali bagaimana faktor gender, disabilitas, dan struktur birokrasi saling beririsan dalam memengaruhi pengalaman perempuan penyandang disabilitas dalam akses ketenagakerjaan (Lessy *et al.*, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada periode Januari hingga Februari 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut telah memiliki kerangka kebijakan ketenagakerjaan inklusif secara normatif, namun

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) memiliki pengalaman langsung dalam program ketenagakerjaan inklusif, (2) terlibat dalam implementasi kebijakan, dan (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam. Jumlah informan ditentukan melalui prinsip kejenuhan data (data *saturation*), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan. Penelitian ini melibatkan sembilan informan yang terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu perempuan penyandang disabilitas sebagai sasaran kebijakan (5 orang), aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya (2 orang), serta perwakilan organisasi penyandang disabilitas (2 orang). Perempuan penyandang disabilitas dipilih sebagai fokus karena mengalami kerentanan berlapis yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat administratif.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan terkait praktik kebijakan ketenagakerjaan inklusif. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di lingkungan instansi pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, serta tempat kerja untuk mengamati secara langsung aspek aksesibilitas, interaksi sosial, dan praktik inklusi. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan instansi, dan data ketenagakerjaan yang relevan.

Data dianalisis secara tematik melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, proses *coding*, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori implementasi kebijakan serta perspektif interseksionalitas. Proses *coding* memadukan pendekatan deduktif dan induktif, dengan kategori awal disusun berdasarkan model implementasi kebijakan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), kemudian dikembangkan secara terbuka untuk menangkap tema-tema yang muncul dari data lapangan.

Perspektif interseksionalitas digunakan sebagai lensa analisis untuk menelusuri interaksi antara gender dan disabilitas dalam setiap kategori. Pendekatan ini memungkinkan pengujian kerangka teoretis sekaligus mengidentifikasi dinamika empiris yang belum terakomodasi dalam model awal. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga mampu menangkap pengalaman sosial yang berlapis.

Untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar kelompok informan. Selain itu, dilakukan *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan pengalaman yang disampaikan. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika dengan memastikan persetujuan informan (*informed consent*), serta menjaga kerahasiaan identitas informan.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan yang Masih Bersifat Administratif. Implementasi kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya masih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan substantif kelompok sasaran. Meskipun pemerintah daerah telah mengacu pada regulasi nasional terkait ketenagakerjaan inklusif, pelaksanaannya di tingkat daerah masih terbatas dalam menjangkau penyandang disabilitas secara

langsung. Sosialisasi kebijakan lebih banyak diarahkan kepada perusahaan dibandingkan kepada penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran utama. Akibatnya, sebagian penyandang disabilitas tidak mengetahui keberadaan program maupun hak ketenagakerjaan yang tersedia.

Terbatasnya akses informasi tersebut mempersempit peluang penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan formal. Penyandang disabilitas yang memiliki jaringan sosial cenderung lebih mudah memperoleh informasi dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau ketergantungan pada keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi informasi publik tidak berlangsung secara setara, tetapi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap jaringan sosial informal.

Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan media informasi yang aksesibel, seperti layanan bahasa isyarat, media audio, maupun informasi visual adaptif. Situasi ini menyebabkan penyandang disabilitas sensorik menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas lainnya. Berbeda dengan (Zainudin *et al*., 2024) yang menempatkan lemahnya sosialisasi sebagai persoalan koordinasi birokrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi juga dipengaruhi oleh desain layanan publik yang belum responsif terhadap keragaman kebutuhan disabilitas.

Keterbatasan implementasi juga dipengaruhi oleh minimnya dukungan sumber daya. Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan memang telah dibentuk, tetapi kapasitas operasionalnya masih terbatas akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Akibatnya, program pelatihan dan pendampingan kerja berjalan tidak konsisten dan lebih bersifat formalitas administratif, bukan sebagai instrumen perluasan akses kerja yang berkelanjutan.

Terbatasnya kapasitas birokrasi terlihat dari minimnya tenaga pendamping dan belum tersedianya kompetensi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan disabilitas. Dalam beberapa kasus, pekerja disabilitas hanya ditempatkan pada pekerjaan sederhana dengan interaksi terbatas karena dianggap dapat menghambat proses kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa eksklusi tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan langsung, tetapi juga melalui pembatasan peran kerja yang dianggap "wajar" dalam praktik organisasi. Temuan ini berbeda dengan (Sihombing *et al*.,2025) yang lebih menekankan aspek teknis kapasitas SDM. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas birokrasi tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga pada posisi sosial penyandang disabilitas dalam struktur kerja formal.

Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki data terpilah berdasarkan gender dan ragam disabilitas yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program maupun evaluasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dirancang cenderung bersifat umum dan belum mampu menjangkau kebutuhan spesifik kelompok sasaran. Ketiadaan data tersebut menyebabkan perempuan penyandang disabilitas diposisikan dalam kategori umum "penyandang disabilitas", sehingga aspek gender dan kerentanan sosial mereka tidak terlihat dalam proses perencanaan kebijakan.

Kondisi serupa tampak pada aspek sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum sepenuhnya aksesibel. Fasilitas dasar seperti *ramp*, toilet aksesibel, dan media informasi adaptif masih terbatas di sejumlah instansi pemerintah maupun lingkungan kerja formal. Hambatan tersebut membuat sebagian penyandang disabilitas harus bergantung pada bantuan orang lain untuk mengakses layanan publik. Dalam konteks ini, keterbatasan infrastruktur tidak hanya menghambat akses fisik, tetapi juga memperkuat pandangan bahwa aksesibilitas masih diperlakukan sebagai pelengkap

layanan, bukan bagian fundamental dari pelayanan publik yang setara.

Secara keseluruhan, lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan belum aksesibelnya lingkungan pelayanan saling berkaitan dalam membentuk hambatan implementasi. Keterbatasan anggaran berdampak pada rendahnya penyediaan fasilitas dan media komunikasi aksesibel, yang pada akhirnya mempersempit partisipasi penyandang disabilitas dalam program ketenagakerjaan. Dengan demikian, hambatan implementasi terbentuk dari relasi antarfaktor birokrasi yang saling memperkuat, bukan dari satu faktor tunggal.

Kelemahan Institusional dan Implementation Gap. Meskipun pemerintah daerah menunjukkan sikap yang relatif terbuka terhadap kebijakan ketenagakerjaan inklusif, komitmen tersebut belum sepenuhnya terlembagakan dalam agenda birokrasi secara berkelanjutan. Isu disabilitas masih diposisikan sebagai program tambahan yang bergantung pada ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan lainnya. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara komitmen normatif kebijakan dan praktik implementasi di tingkat birokrasi daerah. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menerjemahkan prinsip inklusivitas ke dalam layanan publik sehari-hari.

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum tersedianya regulasi teknis maupun SOP khusus terkait ketenagakerjaan disabilitas di tingkat daerah. Aparatur pelaksana masih mengandalkan regulasi nasional yang bersifat umum tanpa petunjuk teknis operasional. Dalam kondisi ini, aparatur tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) memiliki ruang diskresi yang besar dalam menentukan bentuk layanan yang diberikan. Ketika pemahaman aparatur terhadap isu inklusivitas masih terbatas, pelayanan cenderung mengikuti standar umum birokrasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan.

Tidak adanya mekanisme kelembagaan yang jelas juga berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan maupun evaluasi program masih bersifat insidental. Akibatnya, pengalaman langsung penyandang disabilitas belum menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berjalan secara sektoral dan belum berkembang menuju pola *collaborative governance* yang inklusif.

Permasalahan institusional tersebut turut memengaruhi cara birokrasi memahami isu diskriminasi. Sebagian aparatur masih memandang diskriminasi hanya dalam bentuk tindakan langsung, padahal dalam praktiknya hambatan lebih banyak muncul dalam bentuk tidak langsung, seperti keterbatasan komunikasi dan minimnya adaptasi lingkungan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi masih berorientasi pada pendekatan administratif yang menekankan keseragaman layanan, bukan pada prinsip *equity governance* yang mempertimbangkan perbedaan kerentanan antar warga.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan (Warganegara *et al.*, 2025) bahwa keberhasilan kebijakan inklusif sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan komitmen implementasi di tingkat daerah. Penelitian ini menyoroti bahwa lemahnya institusionalisasi kebijakan dapat membuat pelayanan publik berjalan secara simbolik. Akibatnya, kebijakan yang tampak netral pada praktiknya tetap menghasilkan ketimpangan akses bagi kelompok rentan.

Triple Marginalisasi Perempuan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami kondisi yang berbeda dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas. Jika laki-laki penyandang disabilitas masih memiliki dorongan sosial untuk bekerja meskipun menghadapi keterbatasan,

perempuan penyandang disabilitas lebih sering diposisikan dalam ruang domestik. Situasi ini menunjukkan bahwa hambatan yang mereka alami tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil pertemuan berbagai bentuk ketidaksetaraan.

Dalam konteks tersebut, istilah "*triple* marginalisasi" digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika perempuan penyandang disabilitas mengalami ketidaksetaraan akibat persilangan faktor gender, disabilitas, dan kelemahan struktural implementasi kebijakan. Ketiga faktor ini bekerja secara simultan dalam relasi sosial dan birokrasi, sehingga menghasilkan bentuk eksklusi yang lebih kompleks. Dengan demikian, perempuan penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi hambatan sebagai perempuan atau sebagai penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai kelompok yang berada dalam struktur kebijakan yang belum responsif (Pirmasari & McQuaid, 2023).

Bentuk marginalisasi tersebut terlihat dari pengalaman sebagian informan yang belum pernah melamar pekerjaan karena adanya pembatasan keluarga terhadap aktivitas di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak memiliki pengalaman kerja, tidak mengikuti pelatihan keterampilan, dan memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya distribusi informasi kebijakan. Ketika akses informasi lebih banyak diperoleh melalui jaringan informal, perempuan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan tertinggal karena keterbatasan mobilitas sosial. Dalam situasi ini, posisi mereka sebagai perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok dengan akses sosial terbatas saling memperkuat dalam membatasi peluang kerja.

Hambatan lain muncul dalam lingkungan kerja yang belum sepenuhnya adaptif. Dalam beberapa kasus, perempuan penyandang disabilitas ditempatkan pada pekerjaan administratif sederhana tanpa peluang pengembangan kapasitas karena dianggap kurang mampu berinteraksi secara luas dalam lingkungan kerja. Akibatnya, mereka lebih sering ditempatkan pada posisi dengan mobilitas dan interaksi terbatas dibandingkan pekerja lainnya. Situasi ini memperlihatkan bagaimana stigma gender dan disabilitas bekerja secara simultan dalam menentukan posisi kerja.

Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami tiga lapisan marginalisasi, yaitu berbasis gender, disabilitas, dan struktur kebijakan. Ketiganya saling memperkuat dan menghasilkan pengalaman eksklusi yang lebih kompleks dibandingkan kelompok lainnya.

Implikasi terhadap Administrasi Publik Inklusif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan inklusif tidak dapat diukur hanya dari keberadaan regulasi formal. Implementasi kebijakan yang tidak didukung komunikasi aksesibel, kapasitas birokrasi yang memadai, koordinasi lintas sektor, dan mekanisme partisipasi yang kuat berpotensi menghasilkan pelayanan yang bersifat simbolik.

Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama implementasi kebijakan inklusif terletak pada kemampuan birokrasi untuk bergerak dari pendekatan prosedural menuju responsif terhadap keragaman kebutuhan warga. Pelayanan yang tampak setara secara prosedural justru dapat menghasilkan ketimpangan bagi kelompok dengan hambatan sosial yang lebih besar. Selain itu, *implementation gap* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga dengan bagaimana birokrasi mendistribusikan akses pelayanan. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan minimnya fasilitas aksesibel saling berkelindan dalam membatasi partisipasi penyandang disabilitas.

Penelitian ini memperluas kajian implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang tampak progresif secara

normatif belum tentu menghasilkan inklusi substantif. Dalam praktiknya, birokrasi tidak hanya berpotensi gagal mengurangi ketimpangan, tetapi juga dapat mereproduksi ketimpangan melalui distribusi akses yang tidak setara. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan perlu dipadukan dengan perspektif interseksionalitas agar relasi antara birokrasi, kekuasaan, dan ketimpangan sosial dapat dipahami secara lebih kritis. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai arena distribusi akses dan kekuasaan sosial (Thompson *et al*., 2026).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif di Kota Palangka Raya masih belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya dukungan kelembagaan, serta belum adanya regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik implementasi di lapangan. Akibatnya, perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi berlapis yang terbentuk melalui persilangan faktor gender, disabilitas, dan kelemahan implementasi kebijakan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada integrasi model implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan perspektif interseksionalitas dalam menganalisis kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif dan birokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi sosial yang membentuk kerentanan kelompok sasaran. Melalui integrasi kedua perspektif tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa kelemahan implementasi kebijakan dapat mereproduksi ketimpangan sosial dan menghasilkan *triple* marginalisasi terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah memperkuat implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif melalui penyusunan regulasi teknis dan SOP yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Penguatan kapasitas birokrasi juga perlu dilakukan melalui penyediaan anggaran yang memadai, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem data terpilah berbasis gender dan ragam disabilitas, serta penyediaan layanan dan media informasi yang aksesibel. Selain itu, pelibatan organisasi penyandang disabilitas secara partisipatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih responsif terhadap pengalaman kelompok sasaran.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif pada berbagai daerah guna melihat variasi implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif dalam konteks sosial dan kelembagaan yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih partisipatif untuk menggali pengalaman perempuan penyandang disabilitas secara lebih mendalam dalam konteks dunia kerja dan pelayanan publik inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abusalha, S. (2024). Employment experiences of women with disabilities. *Corvinus Journal of Sociology*.

Chan, X. W., & Hutchings, K. (2023). Inequalities, barriers, and facilitators of careers of women with disabilities. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1104784

Deviyeni, P., Zamralita, & Lie, D. (2023). Psychological well-being of disability employments. Biopsikososial, 7(2).

Dewi, N. M., & Arisetyawan, K. (2025). Paradoks pembangunan gender: Pengaruh negatif

terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index

Firmanda, T. (2025). Employment barriers among women with disabilities. Indonesian Journal of Disability Studies. https://ijds.ub.ac.id

Gunawan, T., & Rezki, J. F. (2022). Mapping workers with disabilities in Indonesia: Policy suggestions and recommendations. International Labour Organization. www.ilo.org/publns

Kementerian Sosial RI. (2024). Disabilitas dan tantangan di dunia kerja. https://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/Disabilitas-dan-Tantangan-di-Dunia-Kerja

Kumar, A., Siscawati, M., Anggriani, S., Ratnasari, Nailah, & Willetts, J. (2023). A mosaic of identities, opportunities, and challenges: How intersectionality shapes the experiences of female water, sanitation, and hygiene entrepreneurs in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 29(3), 385–412. https://doi.org/10.1080/12259276.2023.2248807

Lestari, P., & Kurniawan, G. F. (2025). Intersectionality in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*.

Lessy, Z., Kailani, N., & Jahidin, A. (2021). Barriers to employment as experienced by disabled university graduates in Yogyakarta, Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 15(2), 133–144. https://doi.org/10.1111/aswp.12226

Lu, S. E., Moyle, B., Yang, E. C. L., & Reid, S. (2024). Inclusion of people with disability in the workforce. *Tourism Review*. https://doi.org/10.1108/TR-12-2023-0887

Mac-Seing, M., et al. (2021). Intersectional analysis of policy implementation. *International Journal of Health Policy and Management*. https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.1187

Mertina, S., Susanti, A., Alamsyah, M. N., & Irfan, M. (2025). Implementation of protection policy sustainable food agricultural land (LP2B) in Balinggi District Parigi Moutong Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(1), 730–739. https://doi.org/10.54660/.ijmrge.2025.6.1.730-739

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. (2020).

Pirmasari, D. A., & McQuaid, K. (2023). Intersectional experiences in Indonesia. *Social Inclusion*. https://doi.org/10.17645/si.v11i2.7105

Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.

Rai, S. S., Peters, R. M. H., Syurina, E. V., et al. (2020). Intersectionality and health-related stigma. *International Journal for Equity in Health*. https://doi.org/10.1186/s12939-020-01318-w

Saxe, A. (2017). The theory of intersectionality: A new lens for understanding the barriers faced by autistic women. CJDS, 6(4).

Shaw, J., Wickenden, M., & Thompson, S. (2022). Achieving disability inclusive employment. *Journal of International Development*. https://doi.org/10.1002/jid.3692

Sihombing, J., Tri Samudera, M., Ridhanto, R. K. T., & Hertati, D. (2025). Analisis tantangan keterbatasan sumber daya manusia dalam program PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di UPTD Liponsos Keputih. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5).

Sirait, M., Lestariono, W., Alam, M. D. S., Asmawati, Y., Fazi, E. A., & Kahayanto, E. (2024). Implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.

Thompson, S., Rohwerder, B., et al. (2026). Building disability-inclusive futures. IDS Bulletin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2011).

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol.

Warganegara, A., Nizar, M., & Indrajat, H. (2025). Inclusive policy and disability in Indonesia. *SAGE Open*. https://doi.org/10.1177/21582440251378809

Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2022). Social-ecological reflexivity of extractive industry governance? The case of the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *Environmental Policy and Governance*, 32(5), 426–437. https://doi.org/10.1002/eet.1988

Jurnal Progress ADMINISTRASI PUBLIK
JPAP
email : jpap.utb@gmail.com

LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor: 73 /LOA/JPAP/V/2026

Tim Redaksi Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulang Bawang Lampung, menerangkan bahwa artikel dengan judul:

TRIPLE MARGINALISASI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Penulis: Bagas Rizky Ardiansyah[1)], Setianingsih[2)], Suprayitno[3)], Subhan Ilham Thareq[4)]

[1) 2) 3) 4)] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Telah diterima untuk diterbitkan pada Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP), (E-ISSN: 2777 - 0206), (P-ISSN: 2776 - 8511) Volume 6, No. 1, Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jurnal Progress Administrasi Publik

Bandar Lampung, 13 Mei 2026.
Editor in chief

Hinfa Mosshananza, S,I.P., M.I.P.

INDEXED BY